



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

STRATEGI TERPADU MENUJU ZERO KARHUTLA

Firyal Nabihah
Analisis Legislatif Ahli Pertama
firyal.nabihah@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi tantangan serius di Indonesia, meskipun tren kejadian menunjukkan penurunan. Data Kementerian Kehutanan menunjukkan bahwa sepanjang periode Januari hingga 22 April 2025, telah terjadi kebakaran seluas 3.207 hektare, terdiri atas 1.227 hektare lahan gambut dan 1.980 hektare tanah mineral. Provinsi Riau menjadi wilayah dengan luasan karhutla terbesar mencapai 698 hektare, disusul Kalimantan Barat (494 hektare) dan Aceh (296 hektare). Di Riau, kebakaran terbanyak terjadi di Kabupaten Pelalawan (639 hektare), diikuti Bengkalis (48 hektare), Dumai (7,5 hektare), dan Kepulauan Meranti (3,5 hektare). Meski demikian, Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menyatakan bahwa kejadian karhutla mengalami tren penurunan, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam manajemen pengendalian kebakaran.

Namun, ancaman karhutla tetap mengintai. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi bahwa Indonesia tengah memasuki periode *La Nina* atau kemarau basah yang akan berlangsung hingga Mei 2025. Iklim ini justru meningkatkan risiko karhutla di beberapa wilayah, seperti Riau yang akan mengalami musim kemarau panjang mulai Mei hingga September. BMKG juga mencatat adanya peningkatan *hotspot* secara alamiah, bahkan tanpa aktivitas pembakaran. Hal ini disebabkan oleh kombinasi angin kencang, vegetasi kering, dan gesekan ranting, sehingga membuat wilayah-wilayah rawan karhutla menjadi lebih rentan terhadap kebakaran spontan.

Tingkat kerusakan akibat karhutla bukan hanya berdampak pada hilangnya tutupan hutan dan keanekaragaman hayati, tetapi juga menyebabkan kerugian ekonomi dan gangguan kesehatan masyarakat. Data tahun 2024 menunjukkan sekitar 370 ribu hektare hutan dan lahan terbakar, memang lebih rendah dibandingkan dengan 1,1 juta hektare pada 2023. Namun tetap saja, kerugian akibat karhutla diestimasi mencapai triliunan rupiah per tahun, serta mengganggu kualitas udara hingga lintas batas negara. Masalah ini juga memengaruhi diplomasi Indonesia dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura akibat polusi asap lintas negara.

Pemerintah menerapkan pendekatan multisektor dalam penanganan karhutla secara sistematis dan komprehensif melalui empat strategi utama. *Pertama*, memperkuat koordinasi lintas lembaga dengan membentuk *Desk* Koordinasi Penanganan Karhutla yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) dan melibatkan BNPB, TNI, Polri, Kementerian Kehutanan, serta Kementerian Lingkungan Hidup. *Kedua*, melakukan pemadaman cepat melalui kombinasi pemadaman darat dan udara, termasuk Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang dijadwalkan berlangsung di Riau mulai 1 Mei 2025. *Ketiga*, menegakkan hukum secara tegas terhadap individu maupun perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran, guna menimbulkan efek jera dan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. *Keempat*, memperkuat edukasi dan pelibatan masyarakat dengan mengaktifkan kerja kelompok peduli api, pramuka, masyarakat adat, dan komunitas lokal sebagai ujung tombak deteksi dini, termasuk penyelenggaraan Apel Kesiapsiagaan Nasional untuk membangun kesadaran publik.

Pengendalian karhutla diperkuat melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan komunitas lokal, dengan dukungan teknologi, edukasi, serta komunikasi publik, seperti disampaikan Presiden Prabowo dalam Apel Kesiapsiagaan Nasional. Kesiapsiagaan ditingkatkan lewat pelatihan, sistem pelaporan cepat, dan pelibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi dan dunia usaha, mengingat lebih dari 90 persen karhutla disebabkan oleh ulah manusia. Keberhasilan penurunan karhutla dalam dua tahun terakhir menjadi sinyal positif. Namun, upaya ini harus terus dilanjutkan secara terpadu melalui penguatan koordinasi, penerapan teknologi seperti OMC, penegakan hukum tegas, serta literasi publik untuk mencapai target *zero* karhutla secara bertahap.

Atensi DPR

Pengendalian karhutla membutuhkan dukungan politik dan kelembagaan yang kuat, termasuk dari DPR RI, khususnya Komisi IV yang membidangi kehutanan. Komisi IV DPR RI memiliki peran strategis dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap implementasi kebijakan pengendalian karhutla. Pengawasannya meliputi kesiapsiagaan sumber daya, penerapan teknologi pemantauan, hingga penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan, termasuk korporasi pemegang konsesi. Melalui fungsi anggaran, Komisi IV DPR RI juga berperan memastikan alokasi dana penanggulangan karhutla diarahkan secara tepat sasaran, seperti untuk mendukung operasi modifikasi cuaca, pelatihan masyarakat peduli api, dan penguatan kelembagaan di daerah rawan kebakaran. Komitmen anggaran dan pengawasan yang konsisten dari Komisi IV DPR RI sangat penting untuk mendorong target jangka panjang menuju *zero* karhutla dan perlindungan ekosistem hutan Indonesia.

Sumber

antaranews.com, 1 Mei 2025;
bisnis.com, 30 April 2025;
kompas.com, 30 April 2025;
rri.co.id, 2 Mei 2025; dan
tribunnews.com, 2 Mei 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*